BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada fokus masalah di atas, maa penulis menarik kesimpulan bahwa :

a. Rumusan kebijakan pendidikan bersubsidi di kota gorontalo sudah sangat baik, rumusan kebijakan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah kota gorontalo terhadap masyarakat ekonomi menengah ke bawah.melalui kebijakan ini pula, persepsi masyarakat terhadap biaya sekolah yang mahal akan terobat. Namun seharusnya pemerintah kota gorontalo memaksimalkan pengawasan terhadap kebijakan ini, sehingga di manfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan di lapangan, bahwa :

   Dilihat dari implementasi kebijaakn tersebut masih terdapat beberapa hambatan yang di temukan di lapangan, contohnya penyaluran dana yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah dan minimnya anggaran yang di anggarkan oleh pemerintah kota gorontalo pada sekolah tingkat dasar (Sekolah Dasar) jika di lihat dari alokasi anggaran yang setiap tahunnya dikucurkan untuk memenuhi kebutuhan sekolah yaitu sebesar Rp. 5..000.000/sekolah baik TK, PAUD, SD, SMP, dan Rp. 1.000.000/siswa SMA dan SMK. Besaran anggaran yang diterima oleh sekolah tersebut sangat minim dan belum bisa mengakomodir seluruh kebutuhan siswa. Penyaluran dana bagi bagi sekolah dengan membuat rancangan kerja anggaran sekolah dalam hal ini tentunya sangat mempermudah pihak sekolah. Sejalan dengan hal ini tersebut baik dari dinas pendidikan kota gorontalo dan sekolah penerima dana pendidikan bersubsidi harus menjalin komunikasi yang baik sehingga terciptanya sinergitas.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti membarikan saran kepada beberapa pihak yang berhubungan dengan kebijakan pendidikan bersubsidi di kota gorontalo sebagai berikut :

a. Dalam merumuskan kebijakan pendidikan bersubsidi, pemerintah kota gorontalolo harus memperhatikan permasalahan yang ada di tingkat satuan pendidikan kota gorontalo dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah.
b. Dalam merumuskan suatu kebijakan bukan hanya melihat birokrasi kepemerintahan, melainkan dengan instansi terkait seperti ahli pendidikan, kepala sekolah dan juga masyarakat.
c. Penerima dana pendidikan bersubsidi bukan hanya kepala sekolah saja melainkan juga melibatkan bendahara sekolah dan mentransparasikan besaran anggaran yang di terima kepada dewan guru dan seluruh pihak yang ada di lingkungan sekolah.
d. Dalam penelitian ini peneliti sadari bahwa masih terdapat beberapa fenomena yang menarik dalam skripsi ini, oleh sebab itu untuk lebih mengarahkan kesempurnaan penyusun skripsi ini.

Daftar pustaka

Rohman Arif, 2012 *Membebaskan Pendidikan "Refleksi Menuju Penyelenggaraan Demokrasi Pendidikan Di Indonesia*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo

Mahmud Choirul, 2008. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Prof. Dr.S. Nasution, M.A, 2008. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta : PT.Bumi Askara

Drs. Abubakar M.Pd. 2011. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabet.

Susanto Adhi dkk, 2009. *Menuju Jati Diri Pendidikan Yang Mengindonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Prof. Sugyiono 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Prndidikan Kualitatif, Kuantitaf Dan R&D)*, Bandung: Alfabet.CV

Literatur Perundang-undangan

Undang-undang sitem pendidikan Nasional, Yogyakarta: Pustaka pelajar .2011

Website:

Http://www.formmit.org/problematika-sistem-pendidikan-indonesia-a-gagasan-based-syariah-edication

http://www.van88.wordpress.com/makalah-permsalahan-pendidikan-di-indonesia/